Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poigar Satu Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan

Chindy Rouly Silitonga¹, Sisca B. Kairupan², Jetty E.H.Mokat³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

Key word:

Function, Village consultative (BPD, Poigar Village

Accepted: 27 Januari 2024

Revised :30 Januari 2024

Published: 31 Januari 2024

ABSTRACT

This study aims to determine, describe and analyze the Functions of the Village Consultative Body (BPD) in Poigar Satu Village, Sinonsayang District, South Minahasa Regency using qualitative research methods. The results showed that: 1) The form of discussion and agreement on the Draft Village Regulations in Poigar village was carried out in the form of deliberations and there was a collection of community aspirations. There are still so many things that have not been decided by the BPD and the Village Government. 2) The process of collecting the aspirations of the people in Poigar Satu village is carried out by the ASMARA network in each guard, and has issued Perdes every year but only Perdes APD for the realization of the budget and Perdes social design. The existing Village Regulations are communicated to the public through outreach, billboards and the mass media. 3) Supervision by the BPD on the performance of the Head of Poigar Village, namely asking for accountability regarding physical development and administration in writing. But there are physical developments that have been made that have not been effectively felt by the community.

INTISARI

Kata kunci:

Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Poigar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poigar Satu, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa di Desa Poigar dilakukan dalam bentuk musyawarah dan adanya penjangkaran aspirasi masyarakat. Masih banyak sekali hal-hal yang belum diputuskan oleh BPD dan Pemerintah Desa. 2) Proses penjangkaran aspirasi masyarakat di Desa Poigar Satu dilakukan oleh jaringan ASMARA di setiap jaga, dan sudah mengeluarkan Perdes setiap tahunnya namun hanya Perdes APD untuk realisasi anggaran dan Perdes rancangan sosial. Peraturan Desa yang ada dikomunikasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi, baliho, dan media massa. 3) Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Poigar, yaitu meminta pertanggungjawaban mengenai pembangunan fisik dan administrasi secara tertulis. Namun ada pembangunan fisik yang telah dilakukan belum efektif dirasakan oleh masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1 ayat 4 menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 31 ialah: 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.

Masalah yang ada soal Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yakni seperti masih ada begitu banyak hal yang belum diputuskan oleh BPD dan Pemerintah Desa. Bentuk kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa di desa Poigar dilakukan dalam bentuk musyawarah dan ada penjangkangan aspirasi masyarakat. Proses penampungan aspirasi masyarakat di desa Poigar Satu dilakukan dengan jaringan ASMARA di tiap jaga, dan sudah mengeluarkan Perdes setiap tahunnya tetapi hanya Perdes APDes realisasi anggaran dan perdes rancangan sosial kemasyarakatan. Ada pembangunan fisik yang dibuat belum efektif dirasakan masyarakat. Masalah tersebut agak berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 31 yang pertama membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan ketiga yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti perlibatan masyarakat dan wujud untuk menciptakan wujud kehidupan berdemokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik dan bahkan lebih maju apabila diberbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintahan desa yang didampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih. Pada kegiatan operasionalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pemandu dalam pembangunan desa dan juga termasuk dalam penggunaan dana-dana desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga yang sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan disalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus mampu mewakili masyarakat di masing-masing daerah yang memilihnya. BPD merupakan Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa serta penyelenggaraannya berdasarkan sebelas asas, yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poigar Satu Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif untuk mengetahui proses Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poigar Satu Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan alasan data yang di dapat akan lebih lengkap, mendalam, dan bermakna. Lokasi penelitian yang peneliti ambil yakni di Desa Poigar Satu Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. penelitian di fokuskan pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poigar Satu Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31 tentang fungsi BPD. Teknik analisis data menggunakan Miles & Huberman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Poigar Satu

Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu Negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah lainnya adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah juga bias diartikan sebagai penguasa suatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara.

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa serta penyelenggaraannya berdasarkan sebelas asas, yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1 ayat 4 menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pasal 31 menjelaskan BPD mempunyai fungsi: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pasal 32 BPD mempunyai tugas: a) menggali aspirasi masyarakat; b) menampung aspirasi masyarakat; c) mengelola aspirasi masyarakat; d) menyalurkan aspirasi masyarakat; e) menyelenggarakan musyawarah BPD; f) menyelenggarakan musyawarah Desa; g) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; i) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; j) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; k) elakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 menjelaskan tentang Menampung Aspirasi Masyarakat yakni: (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD; (2) Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 36 tentang Penyaluran Aspirasi Masyarakat: (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan; (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa; (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Teori tersebut jika dikaitkan dengan hasil wawancara maka ada beberapa temuan yang berhubungan dengan penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa yakni seperti aspirasi masyarakat sudah ditampung oleh BPD dan pemerintah desa, kemudian di tindak lanjuti berdasarkan prioritas-prioritas yang

paling penting. Proses penampungan aspirasi masyarakat di desa Poigar Satu dilakukan dengan jaringan ASMARA di tiap jaga. Desa Poigar Satu sudah mengeluarkan Perdes setiap tahunnya tetapi hanya Perdes APDes realisasi anggaran dan perdes rancangan sosial kemasyarakatan. Peraturan desa yang ada di desa Poigar disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi, media baliho, dan media massa.

Pasal 44 tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa: (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa; (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD; (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD; (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD; (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Jika teori tersebut dikaitkan dengan hasil wawancara maka ada beberapa temuan terkait Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa yakni mulai dari Pemerintah Desa bahkan masyarakat telah mengetahui Fungsi-Fungsi dari BPD. Bentuk kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa di desa Poigar dilakukan dalam bentuk musyawarah dan ada penjaringan aspirasi masyarakat. Selanjutnya masih ada begitu banyak hal yang belum diputuskan oleh BPD dan Pemerintah Desa. Kemudian proses lewat musdes dilakukan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat.

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam Pasal 46: (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan teori tersebut jika dikaitkan dengan data hasil wawancara yang peneliti dapatkan, maka ada beberapa temuan terkait fungsi BPD dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa seperti kinerja dari Kepala Desa Poigar sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD termasuk juga dengan anggaran belanja desa. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Poigar yakni meminta pertanggungjawaban tentang pembangunan fisik dan administrasi secara tertulis. Bahkan ada pembangunan fisik yang dibuat belum efektif dirasakan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data penelitian tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Poigar Satu yang telah didapatkan oleh peneliti seperti yang telah dipaparkan dan diuraikan oleh peneliti, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa masih ada begitu banyak hal yang belum diputuskan oleh BPD dan Pemerintah Desa. Bentuk kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa di desa Poigar dilakukan dalam bentuk musyawarah dan ada penjaringan aspirasi masyarakat. Proses penampungan aspirasi masyarakat di desa Poigar Satu dilakukan dengan jaringan ASMARA di tiap jaga. Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Poigar yakni meminta pertanggungjawaban tentang pembangunan fisik dan administrasi secara tertulis. Tetapi ada pembangunan fisik yang dibuat belum efektif dirasakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Christine Ayu Setyaningrum. 2019. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Artikel.
- Emzir. 2016. Metode Penelitian Sosisal: Analsiis Data. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ester Juita Punu. 2016. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Artikel.
- Hakim, Lukman. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. Naturalistic Inquiry. California: Sage.
- M. Solly Lubis. 2007. Ilmu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Mansyur, Achmad. 2018, Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. Jakarta: PT.Balai Pustaka.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Sri Hartati. 2010. Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Artikel.
- Suradinata, 2007. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah, Jakarta: Gramedia Pustaka. Utama.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.